



# STANDAR MUTU

## PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

SK REKTOR UKSW TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SPMI UKSW

### 1. DEFINISI ISTILAH

- 1.1. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) adalah perguruan tinggi di Salatiga yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW).
- 1.2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UKSW secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 1.3. Kebijakan mutu adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana UKSW memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.
- 1.4. Manual mutu adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.
- 1.5. Standar mutu adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UKSW untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UKSW.
- 1.6. Prosedur mutu adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien.
- 1.7. Instruksi kerja adalah dokumen yang menerangkan secara rinci langkah-langkah teknis dalam suatu kegiatan untuk memastikan hasil efektif dan sesuai dengan yang direncanakan.
- 1.8. Formulir adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar mutu dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar mutu dalam SPMI diimplementasikan.

### 2. RASIONAL STANDAR

Komponen biaya dan dana untuk pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan salah satu komponen penting dalam mewujudkan PKM di UKSW yang berkualitas, sehingga perlu ditetapkan standar yang memuat bagaimana seharusnya pembiayaan dan pendanaan PKM. Standar mutu pembiayaan dan pendanaan PKM merupakan acuan keunggulan UKSW dalam mengatur pembiayaan dan pendanaan PKM dalam satu kesatuan SPMI. Standar mutu pembiayaan PKM adalah standar mutu yang mengatur bagaimana pembiayaan dan pendanaan PKM dilaksanakan di UKSW. Standar mutu ini ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan pembiayaan dan pendanaan PKM dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pembiayaan PKM terkait dengan biaya operasional penelitian, investasi untuk penyelenggaraan PKM, perencanaan keuangan, realisasi keuangan, pertanggungjawaban keuangan hingga pengelolaan dana PKM secara umum. Standar mutu ini ditetapkan di UKSW sebagai bagian dari komitmen UKSW untuk mengimplementasikan SPMI yang dilakukan atas dasar SNPT dan tuntutan akreditasi. Hal ini merupakan perwujudan dari langkah-langkah UKSW dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan melalui penetapan standar mutu pembiayaan

dan pendanaan PKM yang komprehensif dan mampu menjadi acuan dalam penyelenggaraan PKM yang lebih bermutu.

### 3. ISI STANDAR

<b>KODE STANDAR</b>	5.6
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	Program studi merealisasikan dana investasi SDM dan Sarpras sesuai dengan perencanaan untuk melampaui standar PKM dan mewujudkan suasana akademik yang kondusif.
<b>INDIKATOR PENCAPAIAN</b>	Tersedianya rencana investasi SDM dan Sarpras yang melampaui standar PKM untuk mewujudkan suasana akademik yang kondusif, serta telah terealisasi, dibuktikan dengan dokumen yang mencukupi dan meyakinkan.
<b>STRATEGI PENCAPAIAN</b>	Merealisasikan rencana anggaran untuk berbagai bentuk investasi SDM dan sarana prasarana yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan untuk aktivitas pendidikan, penelitian dan PKM sesuai dengan perencanaan tahunan yang sudah dilakukan untuk mewujudkan suasana akademik yang kondusif.
<b>PROSEDUR TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prosedur realisasi anggaran,</li><li>2. Prosedur pengadaan sarana prasarana,</li><li>3. Prosedur studi lanjut dosen,</li><li>4. Prosedur studi lanjut tenaga kependidikan,</li><li>5. Prosedur keikutsertaan dalam kegiatan eksternal,</li><li>6. Prosedur penyelenggaraan kegiatan.</li></ol>

### 4. PIHAK TERKAIT

- 4.1. Rektor
- 4.2. Pembantu Rektor Bidang Akademik
- 4.3. Pembantu Rektor Bidang Keuangan
- 4.4. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan
- 4.5. Pembantu Rektor Bidang Kerjasama Kelembagaan
- 4.6. Pembantu Rektor Bidang Penelitian dan PKM
- 4.7. Dekan
- 4.8. Ketua Program Studi
- 4.9. Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas
- 4.10. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

### 5. REFERENSI

- 5.1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5.2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 5.3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.4.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi

5.7.Pedoman sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, diterbitkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu & Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

5.8.Statuta UKSW Tahun 2016